

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Profil PT Bank Mandiri(Persero)Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998 di Jakarta, Indonesia, sebagai respons terhadap krisis moneter yang melanda Asia pada akhir 1990-an. Krisis ini menyebabkan banyak bank di Indonesia mengalami kesulitan finansial, termasuk empat bank milik negara, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang akhirnya digabungkan untuk membentuk Bank Mandiri. Penggabungan ini merupakan langkah dari pemerintah untuk menciptakan institusi perbankan yang lebih kuat dan efisien, serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Proses penggabungan ini diresmikan pada bulan Juli 1999 (Bank Mandiri, 2024).

Dalam beberapa tahun pertama operasinya, bank ini berfokus pada restrukturisasi dan penguatan modal untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Pada tahun 2003, Bank Mandiri melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta yang menjadikannya sebagai salah satu bank publik terbesar di Indonesia. Dalam perjalanannya, Bank Mandiri berkomitmen untuk berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan Indonesia, menawarkan beragam produk dan layanan finansial yang mencakup sektor ritel, korporasi, syariah, dan digital (Bank Mandiri, 2024).

1.1.2 Logo PT Bank Mandiri



Gambar 1. 1 Logo PT Bank Mandiri

Sumber: (Bank Mandiri, 2024)

Logo Bank Mandiri diperkenalkan pada 14 Januari 2008, sebagai bagian dari transformasi merek, yang mencerminkan visi dari Bank Mandiri untuk menjadi institusi keuangan terkemuka yang kokoh, inovatif, dan dipercaya masyarakat. Logo ini memiliki desain yang merepresentasikan nilai-nilai inti dan identitas perusahaan. Huruf kecil "mandiri" melambangkan sikap ramah dan rendah hati yang menunjukkan fokus Bank Mandiri untuk melayani semua segmen masyarakat. Bentuk gelombang emas mencerminkan fleksibilitas dan pandangan progresif Bank Mandiri dalam menghadapi tantangan di industri keuangan. Warna biru tua pada logo merepresentasikan kepercayaan, stabilitas, dan rasa aman yang ditawarkan kepada nasabah, sedangkan warna emas melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan optimisme (Bank Mandiri, 2024).

1.1.3 Visi dan Misi PT Bank Mandiri

Bank mandiri memiliki visi dan misi, yaitu:

- a. Visi: Menjadi partner finansial pilihan utama anda
- b. Misi: Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan *simple* yang menjadi bagian hidup nasabah

Melalui visi dan misinya, Bank Mandiri terus berupaya memberikan solusi keuangan yang terpercaya, inovatif, dan relevan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Bank Mandiri, 2024).

1.1.4 Layanan PT Bank Mandiri

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan ritel, korporasi, syariah, dan digital, termasuk tabungan, kredit, dan layanan *mobile banking*. Layanan perbankan ritel ini mencakup produk tabungan seperti Tabungan *Now* yang menawarkan kemudahan pembukaan rekening secara *online* dan transaksi yang fleksibel. (Bank Mandiri, 2024)

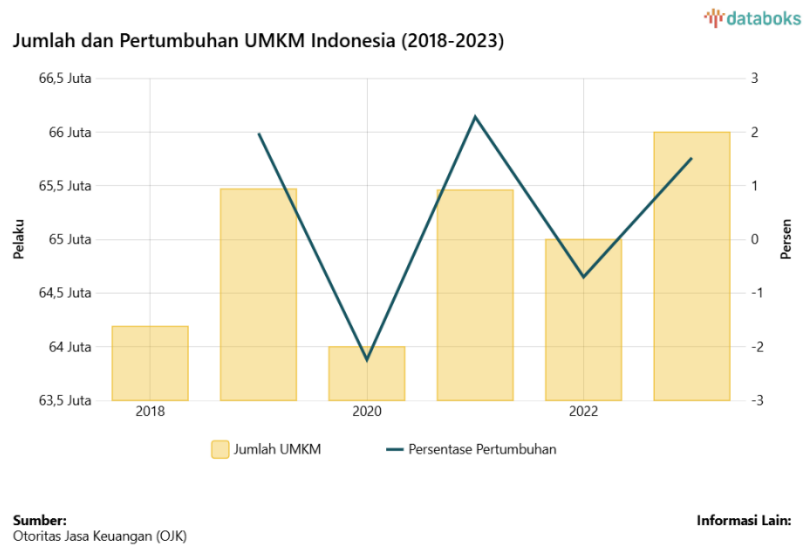
Di sisi perbankan korporasi, Bank Mandiri menawarkan solusi seperti *trade finance* dan *cash management* yang membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dan transaksi internasional. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih kompleks dengan platform digital seperti Kopra by Mandiri, yang menyediakan akses terintegrasi untuk berbagai layanan keuangan. Untuk nasabah yang memilih perbankan syariah, Bank Mandiri menyediakan produk tabungan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip

syariah dan memberikan alternatif bagi mereka yang mencari layanan perbankan berbasis nilai-nilai Islam. Bank Mandiri juga memiliki fokus pada layanan digital dengan Livin' by Mandiri sebagai aplikasi unggulan yang mengintegrasikan berbagai layanan perbankan dalam satu platform (Bank Mandiri, 2024).

Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bank Mandiri menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Menengah (KUM) yang merupakan dua produk pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Dengan berbagai layanan ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan solusi perbankan yang komprehensif dan inovatif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (Bank Mandiri, 2024).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM merupakan suatu bisnis milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan undang-undang. UMKM memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kejaksaan Negeri Batu, 2023). UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian yang mendukung ketahanan ekonomi nasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Hal ini dibuktikan dengan kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2023 yang mencapai 60,51% dan melibatkan hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Seiring dengan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, UMKM terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).



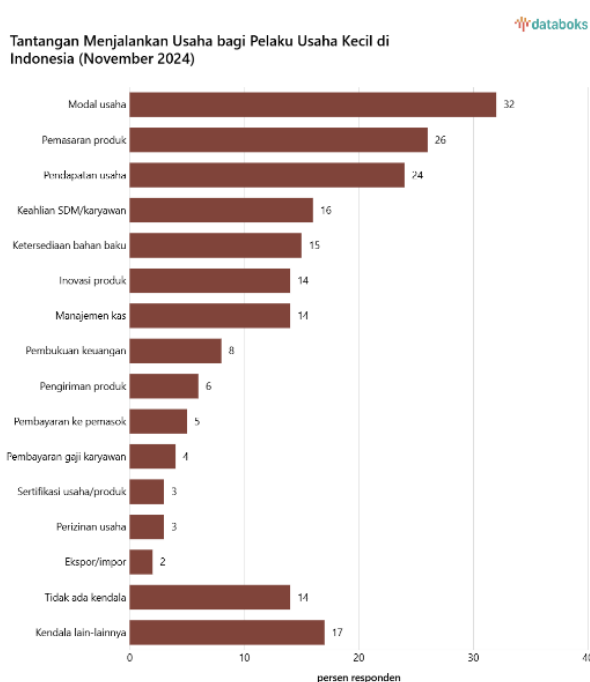
Gambar 1. 2 Jumlah dan Pertumbuhan UMKM di Indonesia (2018-2023)

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024)

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 64,19 juta pelaku usaha. Pada tahun berikutnya, jumlah pelaku UMKM naik sebesar 1,98% menjadi 65,47 juta pelaku usaha, hal ini menunjukkan adanya sinyal pertumbuhan UMKM yang positif. Namun saat pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020, terdapat kebijakan dari pemerintah yang membatasi aktivitas ekonomi yang berpengaruh pada perubahan pola konsumsi, sehingga terjadi penurunan drastis sebanyak 2,24%. Pelaku UMKM berhasil bangkit dengan peningkatan sebesar 2,28% yang mencapai total 65,46 juta pelaku usaha pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2022 mengalami sedikit kemunduran menjadi 0,7%, para pelaku UMKM mencatat rekor baru pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,52% menjadi 66 juta pelaku usaha. Pertumbuhan ini merupakan angka tertinggi dari jumlah pelaku UMKM selama 6 tahun terakhir, hal tersebut mencerminkan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara. Meskipun memegang peranan yang besar dalam perekonomian negara, UMKM masih di hadapkan dengan berbagai tantangan kompleks yang menghambat pertumbuhan bisnis (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024).

Banyak pelaku UMKM yang kekurangan kapasitas manajemen, seperti pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis yang berdampak pada efisiensi operasional. Sama halnya dengan pemasaran, sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas termasuk ekspor menjadi hambatan bagi UMKM, meskipun era digital telah membuka peluang besar. Minimnya pemanfaatan teknologi digital juga menghambat peningkatan

efisiensi dan kemampuan bersaing, ditambah dengan masalah standarisasi dan sertifikasi yang sulit dan mahal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil menghambat distribusi dan pengembangan usaha. Tantangan lainnya juga berasal dari regulasi yang seringkali memberatkan, seperti perizinan usaha dan pajak. Di antara semua kendala tersebut, akses permodalan menjadi salah satu hambatan yang paling besar, di mana banyak UMKM yang kesulitan untuk memperoleh pembiayaan akibat minimnya jaminan yang dimiliki, literasi keuangan yang rendah, serta prosedur administrasi yang rumit (Penyebab Bisnis UMKM Bangkrut: Tantangan Dan Faktor Utama, 2023).



Gambar 1. 3 Tantangan yang Dihadapi Pelaku Usaha Kecil pada 2024

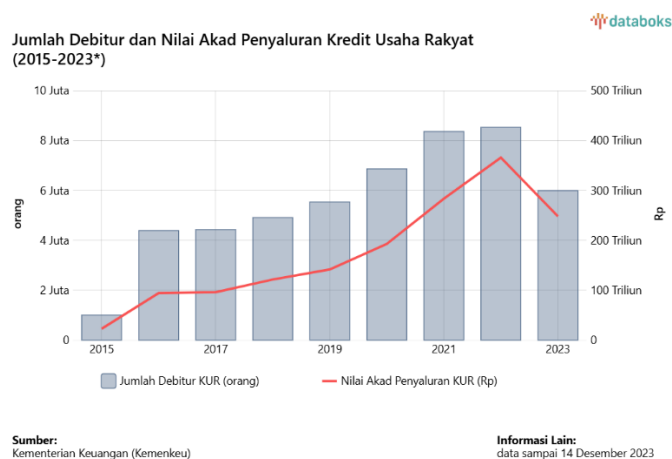
Sumber: (Mandiri Institute, 2024)

Grafik tersebut menjadi bukti bahwa permodalan mendominasi kendala utama yang dialami oleh UMKM di Indonesia, dimana sebanyak 32% dari 523 pelaku UMKM yang menjadi responden memiliki permasalahan dalam permodalan. Hingga kini, banyak pelaku UMKM menjalankan usahanya dengan bergantung sepenuhnya pada modal pribadi atau sumber keuangan dari keluarga. Hal ini tidak hanya membatasi untuk meningkatkan kapasitas produksi saja, tetapi juga mempersempit peluang untuk melakukan ekspansi dan mendukung keberlanjutan maupun pengembangan usaha (Taufik

et al., 2024). Berdasarkan masalah tersebut, pemerintah telah memberikan solusi untuk masalah permodalan UMKM yaitu dengan adanya pinjaman modal usaha (Azra, 2020).

Kredit Usaha adalah pembiayaan dari bank yang diberikan untuk mendukung kebutuhan usaha nasabah berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam dengan kewajiban melunasi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini mencakup kebutuhan modal kerja untuk aktivitas operasional seperti pembelian persediaan atau pembiayaan piutang dagang. Selain itu, pembiayaan investasi digunakan untuk keperluan jangka panjang seperti pembelian aset tetap, pembangunan fasilitas usaha, atau pembelian kendaraan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020). Adapun bentuk kredit usaha yang diterbitkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang ditujukan untuk mendukung sektor UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Bank Mega, 2024).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui lembaga keuangan yaitu bank dengan mekanisme penjaminan. Program ini dibuat untuk memperkuat permodalan usaha sebagai upaya mendukung kebijakan dalam percepatan pengembangan sektor riil dan mendorong keberlanjutan UMKM (Kredit Usaha Rakyat, 2007). Program tersebut dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan akses modal yang lebih terjangkau dan inklusif (Simulasikredit.com, 2023).



Gambar 1. 4 Jumlah Debitur dan Nilai Akad Penyaluran KUR

Sumber: (Kementrian Keuangan, 2023)

Grafik ini menunjukkan perkembangan jumlah debitur dan nilai akad penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023. Jumlah debitur

secara konsisten meningkat setiap tahun, namun ada penurunan jumlah debitur di tahun 2023 mencapai 5,99 juta debitur. Nilai akad penyaluran KUR juga tumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan jumlah Rp 365,96 triliun, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 248,14 triliun. Data ini mencerminkan pertumbuhan akses dan distribusi pembiayaan KUR (Kementerian Keuangan, 2023). Penyaluran KUR dilakukan oleh beberapa bank, salah satunya adalah bank Mandiri (kontan.co.id, 2024).

Tabel 1. 1. Deretan Top 10 Bank Terbesar Indonesia

No	Nama Bank	Aset kuartal III/2023	Aset kuartal III/2022	(yoy)
1	Bank Mandiri	Rp2.006,93 triliun	Rp1.839,33 triliun	9,11%
2	BRI	Rp1.851,96 triliun	Rp1.684,6 triliun	9,93% yoy
3	BCA	Rp1.381,44 triliun	Rp1.288,72 triliun	7,19%
4	BNi	Rp1.009,3 triliun	Rp943,6 triliun	6,96%
5	BTN	Rp409,67 triliun	Rp389,29 triliun	5,23%
6	CIMB Niaga	Rp329,13 triliun	Rp306,96 triliun	7,22%
7	BSI	Rp319,84 triliun	Rp280 triliun	14,22%
8	Bank Permata	Rp251,9 triliun	Rp220,45 triliun	14,26%
9	OCBC	Rp246,99 triliun	Rp220,39 triliun	12,06%
10	Bank Panin	Rp211,41 triliun	Rp199,3 triliun	6,07%

Sumber: (Burhan, 2023)

Data diatas menunjukkan total aset dari sepuluh bank terbesar di Indonesia pada kuartal III tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022. Bank Mandiri menempati posisi teratas dengan total aset sebesar Rp2.006,93 triliun, meningkat 9,11% dari Rp1.839,33 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan persaingan ketat dan pertumbuhan positif di sektor perbankan Indonesia (Burhan, 2023).

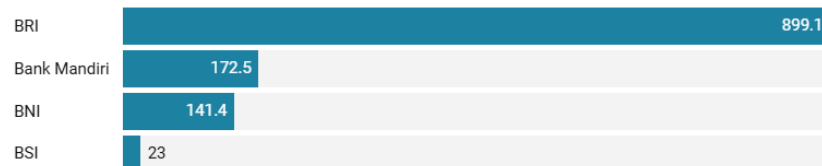
PT Bank Mandiri Tbk telah di percaya oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari bank penyalur KUR sejak tahun 2007 (Kredit Usaha Rakyat, 2007a). Selain KUR, Bank Mandiri juga menawarkan Kredit Usaha Mikro (KUM) untuk mendukung para pelaku UMKM dalam pembiayaan.KUM adalah produk internal

Bank Mandiri yang memiliki beberapa fitur, termasuk limit kredit hingga Rp500 juta, jangka waktu sampai 5 tahun, serta suku bunga yang kompetitif dengan angsuran tetap setiap bulan. Proses pengajuan KUM juga dirancang dengan persyaratan yang ringan, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan (Bank Mandiri, 2024).

Hasil penelitian dari Rudiyanto (2022) mengindikasikan bahwa penyediaan kredit pinjaman perbankan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung UMKM yang sedang menghadapi kendala dalam permodalan. Namun, pelaku UMKM seringkali menerima hambatan dalam mendapatkan pinjaman modal. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam menyediakan jaminan yang kuat (Viktoria Wulandari *et al.*, 2024). Rudiyanto (2022) juga menyebutkan meskipun peran perbankan terhadap pengembangan UMKM melalui permodalan sudah baik, tetapi masih belum optimal.

Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Nilai Akad Terbesar

*Data 2014- 26 Desember 2022 (Dalam Rp Triliun)

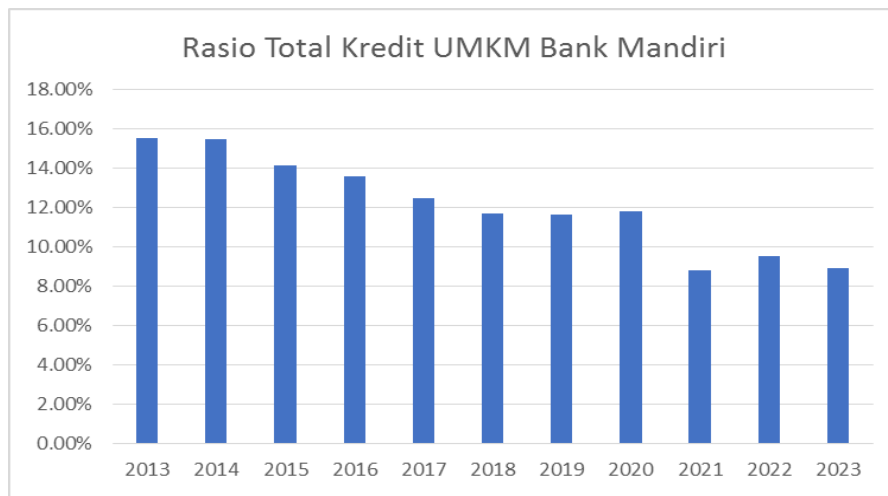


Gambar 1. 5 Bank Penyalur KUR Dengan Nilai Akad Terbesar

Sumber: (Putri, 2022)

Pada periode 2014 hingga 26 Desember 2022, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai akad mencapai Rp 899,07 triliun. Bank Mandiri berada di urutan kedua dengan nilai akad sebesar Rp 172,5 triliun, disusul oleh Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 141,4 miliar, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 23 miliar. Di samping itu, sejumlah bank dan lembaga lainnya juga telah menyalurkan KUR dengan nilai total mencapai Rp 114,27 triliun. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kemenko Perekonomian, terdapat 40 penyalur KUR aktif yang mencakup Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), serta Perusahaan Pembiayaan (Putri, 2022).

Seiring dengan diterapkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan serta bantuan teknis oleh bank umum untuk mendukung pengembangan UMKM, diperlukan pengaturan pelaksanaan yang lebih spesifik. Aturan ini disampaikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia untuk memastikan pemberian kredit, pembiayaan, dan bantuan teknis oleh bank umum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Rencana pemberian kredit atau pembiayaan UMKM menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun dengan target tahunan rasio kredit UMKM terhadap total kredit. Target ini mencakup rasio minimum berdasarkan tahun, yaitu sesuai dengan kemampuan bank pada tahun 2013-2014, 5% pada tahun 2015, 10% pada tahun 2016, 15% pada tahun 2017, mulai 2018 dan seterusnya ditetapkan paling rendah 20%. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.



Gambar 1. 6 Data Rasio Total Kredit UMKM (2013-2023)

Sumber: Lampiran 1

Data porsi kredit kepada UMKM terhadap total kredit Bank Mandiri dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2013, porsi kredit kepada UMKM mencapai 15,49%, namun angka ini terus menurun hingga hanya 8,90% pada tahun 2023. Penurunan tersebut mencerminkan semakin kecilnya proporsi pembiayaan yang dialokasikan Bank Mandiri untuk sektor UMKM dibandingkan dengan keseluruhan portofolio kredit yang dimilikinya.

Penggunaan rasio kredit kepada UMKM penting untuk mengukur komitmen bank dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurunnya porsi ini dapat mengindikasikan beberapa hal, seperti meningkatnya preferensi bank terhadap segmen kredit korporasi atau ritel yang dianggap lebih stabil dan rendah risiko, serta tantangan internal UMKM dalam memenuhi persyaratan perbankan formal. Meskipun sempat ada sedikit peningkatan di tahun 2020 dan 2022, kemungkinan besar akibat kebijakan pemulihan ekonomi dan relaksasi kredit pasca-pandemi COVID-19, namun tren jangka panjangnya tetap menunjukkan penurunan. Hal ini menandakan perlunya strategi lebih inklusif dan proaktif dari pihak Bank Mandiri untuk kembali mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM secara berkelanjutan, baik melalui inovasi produk, penyesuaian kebijakan risiko, maupun kolaborasi dengan lembaga penjamin.

Namun pada pelaksanaan pemberian kredit pada umkm, angka rasio kredit UMKM yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak sesuai dengan rasio kredit UMKM di Bank Mandiri. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rasio kredit UMKM terhadap total kredit Bank Mandiri mengalami penurunan selama 2013 hingga 2023. Pada tahun 2013, rasio berada di atas 15%, namun secara bertahap terus menurun hingga di bawah 10% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa rasio kredit umkm terhadap total kredit Bank Mandiri tidak sesuai dengan standar yang tertera pada peraturan Bank Indonesia. Kesenjangan lain dari nilai rasio kredit UMKM Bank Mandiri dan standar yang tertulis pada peraturan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2018, bank umum wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) paling sedikit 20% dari total portofolio kredit atau pembiayaan bank. Namun, baru 8,9% dari total kredit UMKM yang disalurkan Mandiri (Tempo., 2024). Hal ini menunjukkan rasio kredit UMKM Bank Mandiri masih jauh dari ketentuan Bank Indonesia.

Penelitian ini akan meneliti mengenai Bank Mandiri karena Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan total aset yang cukup besar dan memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara. Bank Mandiri memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit, termasuk kredit

untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyaluran kredit UMKM hanya tumbuh 3,2% YoY menjadi Rp87 triliun, padahal secara keseluruhan kredit Bank Mandiri tumbuh 19,5% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi kredit UMKM masih jauh di bawah ambang batas minimum 20% dari total kredit yang dipersyaratkan sejak tahun 2018. Divisi korporasi dan komersial yang masing-masing tumbuh 26,7% dan 23% YoY menjadi sasaran utama upaya penyaluran kredit Bank Mandiri, meskipun pertumbuhan kredit UMKM relatif lebih lambat (Hutauruk, 2025). Alasan penelitian ini hanya akan mengkaji Bank Mandiri adalah karena peneliti ingin berkonsentrasi pada satu topik saja agar dapat memberikan kajian yang lebih mendalam dan terarah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar rasio kredit UMKM Bank Mandiri.

Penurunan pembiayaan UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya persepsi negatif yang dimiliki UMKM terhadap kredit perbankan yang dianggap bahwa suku bunga bank terlalu tinggi. Selain itu prosedur pengajuan kredit yang dianggap rumit. Persyaratan agunan juga dianggap memberatkan karena tidak sesuai dengan kemampuan mereka (Rudiyanto, 2022). Selain itu, prioritas perbankan dalam menyalurkan kredit juga mulai bergeser kepada sektor lain yang memberikan keuntungan lebih besar atau memiliki risiko yang lebih rendah. Kekhawatiran bank terhadap tingginya risiko kredit macet pada segmen UMKM juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas portofolio kredit perbankan (Indrajaya, 2024).

Jumlah kredit yang disalurkan bank dalam kaitannya dengan keseluruhan kredit atau asetnya dikenal sebagai rasio kredit. Rasio ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan seberapa besar kontribusi bank terhadap pendanaan industri tertentu, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena signifikansinya dalam mengukur tingkat bantuan perbankan untuk sektor UMKM dan kepatuhan terhadap kebijakan Bank Indonesia, penelitian ini mengkaji rasio kredit. Selain mencerminkan metode perbankan yang digunakan untuk mendistribusikan pembiayaan, rasio kredit juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur seberapa baik kebijakan bekerja untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit (Çetin *et al.*, 2023).

Tahun	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit
2013	15.49%

2014	15.44%
2015	14.14%
2016	13.55%
2017	12.47%
2018	11.68%
2019	11.64%
2020	11.79%
2021	8.82%
2022	9.52%
2023	8.90%

Data rasio kredit UMKM terhadap total kredit Bank Mandiri dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, rasio kredit UMKM tercatat sebesar 15,49%, namun angkanya terus menurun hingga mencapai 8,90% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya porsi pembiayaan UMKM dibandingkan total kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2020 dan 2022—kemungkinan akibat program stimulus dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19—namun hal tersebut belum cukup untuk membalikkan tren penurunan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan besar seperti Bank Mandiri, baik karena faktor kelayakan kredit, risiko usaha, maupun kebijakan internal bank yang lebih berhati-hati terhadap sektor UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang lebih kuat agar Bank Mandiri dapat meningkatkan peran serta kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Menurut penelitian Hamdani & Farmiati (2021), penyediaan pinjaman investasi oleh bank kepada UMKM Aceh berdampak baik pada ekspansi keuangan perusahaan-perusahaan ini. Menurut Faisal & Sejati (2023), Bank Syariah Indonesia dapat membantu UMKM tumbuh dengan memberikan pembiayaan modal awal, dukungan keuangan tambahan, dan fasilitas pembiayaan UMKM yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Namun, penelitian Rifai dkk. (2024) menghasilkan temuan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa kredit komersial memiliki korelasi positif dengan perkembangan kredit UMKM di wilayah Jawa, namun penyaluran KUR tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan kredit

UMKM di wilayah Jawa. Selain itu, Lumintang dkk. (2019) menunjukkan bahwa perkembangan kredit UMKM di Provinsi Sulawesi Utara tidak terpengaruh oleh aturan penyaluran kredit UMKM.

Adanya gap dari hasil penelitian-penelitian di atas, menunjukkan diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran kredit terhadap pertumbuhan UMKM dalam konteks perbankan tertentu, serta sejauh mana kebijakan kredit yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara penyaluran pinjaman dan pertumbuhan UMKM dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kebijakan bank, geografi, dan jenis kredit. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji rasio penyaluran pinjaman UMKM Bank Mandiri dan apakah rasio tersebut mematuhi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang efisiensi program penyaluran pinjaman UMKM Bank Mandiri dan bagaimana program tersebut telah membantu pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi perbankan dan regulator dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Meskipun Bank Mandiri memiliki total aset paling besar di Indonesia, namun pada data rasio kredit UMKM Bank Mandiri diduga nilai tersebut berada di bawah atau tidak sesuai dengan standar yang tertulis pada peraturan Bank Indonesia. Adanya kesenjangan antara nilai rasio kredit UMKM Bank Mandiri dan standar yang tertulis pada peraturan Bank Indonesia, maka perlu dilakukan uji komparasi mengenai hal tersebut. Sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi penyebab kesenjangan nilai tersebut. Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan menjawab tantangan permodalan yang dirasakan UMKM sehingga menjadi urgensi penelitian, bersama dengan tantangan bank mandiri yang telah disebutkan.

1.3 Perumusan Masalah

UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap PDB nasional. Namun, sektor ini masih menghadapi kendala besar dalam akses permodalan, yang menjadi hambatan utama untuk keberlanjutan dan ekspansi usaha. Pemerintah telah memberikan solusi dari kendala tersebut, yaitu dengan adanya kredit usaha melalui perbankan. Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang membantu dalam penyaluran kredit

pada UMKM. Meskipun Bank Mandiri merupakan bank dengan total aset paling besar di Indonesia, namun penyaluran kredit terhadap UMKM masih rendah dilihat dari nilai rasio kredit UMKM Bank Mandiri yang kecil. Berdasarkan fenomena ini dan paparan pendukung melalui latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Sudah sejauh mana rasio penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri selama 10 tahun terakhir?
- b. Apakah terdapat kesesuaian antara rasio kredit UMKM di Bank Mandiri dengan standar peraturan Bank Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sudah sejauh mana rasio penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri selama 10 tahun terakhir
- b. Untuk mengetahui adanya kesesuaian antara rasio kredit UMKM di Bank Mandiri dengan standar peraturan Bank Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi dalam memperkaya studi ilmiah mengenai penyaluran kredit perbankan terhadap UMKM.

1.5.2 Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam masalah permodalan serta memahami cara mengelola kredit dengan lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada bank, khususnya Bank Mandiri, dalam merancang strategi pemberian kredit yang lebih baik dan penyesuaian kebijakan bagi umkm, dengan mempertimbangkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit yang sesuai dengan standar peraturan Bank Indonesia, serta memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Terdapat sistematika penulisan dalam penelitian ini, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai penjelasan gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan penjelasan singkat dan padat mengenai landasan teori yang mendasari topik serta variabel penelitian, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji beda 2 variabel independen yang diolah menggunakan SPSS.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan karakteristik data, hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang bertujuan untuk menjawab perumusan masalah secara rinci.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran bagi penelitian selanjutnya atau pihak terkait.